

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran komunikasi dalam kesehatan adalah sebagai praktisi dalam upaya menyebarluaskan informasi-informasi promosi kesehatan kepada masyarakat supaya tujuan kesehatan tersebut sampai kepada masyarakat dan bisa mempengaruhi pola hidup sehat masyarakat, menumbuhkan kesadaran akan kesehatan, dan memberikan motivasi kepada individu-individu untuk berperilaku sehat. Hal tersebut yang menjadi tujuan utama dari terlibatnya komunikasi dalam kesehatan. Dengan dilibatkannya praktisi komunikasi dalam kampanye kesehatan diharapkan bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menentukan strategi promosi kesehatan masyarakat agar tepat sasaran dan lebih efektif. (Dwi Susilowati,2016)

Dalam sebuah acara promosi kesehatan yang dilakukan di America Serikat, dengan mengusung judul “The Healthy People 2010 Information” ini mengemukakan bahwa tidak ada jalan lain mensukseskan kesehatan masyarakat kecuali dengan memanfaatkan jasa komunikasi. Dengan ini peranan ilmu komunikasi disini sangat diperlukan untuk menyukseskan kampanye kesehatan ini. Didalam buku “Dasar-dasar Komunikasi Kesehatan”, Liliweri Allo juga berpendapat bahwa komunikasi kesehatan merupakan studi yang mempelajari bagaimana menggunakan strategi komunikasi untuk menyebarluaskan informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi individu dan komunitas.

Komunikasi kesehatan mencakup pemanfaatan jasa komunikasi untuk menyampaikan pesan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan upaya peningkatan dan pengelolaan kesehatan oleh individu maupun komunitas dan masyarakat. Selain itu komunikasi kesehatan juga menyebarluaskan informasi tentang mengubah sikap dan memberikan motivasi

kepada individu untuk mengadopsi kepada perilaku sehat yang direkomendasikan menjadi tujuan utama komunikasi kesehatan.

Komunikasi kesehatan memberikan kontribusi dan menjadi bagian dari upaya promosi kesehatan. Komunikasi kesehatan juga dianggap relevan dengan beberapa konteks dalam bidang kesehatan, termasuk didalamnya hubungan antara ahli medis dengan pasien, daya jangkau individu dalam mengakses serta memanfaatkan informasi kesehatan, kepatuhan individu pada proses pengobatan yang harus dijalani serta kepatuhan dalam melakukan saran medis yang diterima, bentuk penyampaian pesan kesehatan dan kampanye kesehatan, penyebaran informasi mengenai resiko kesehatan pada individu dan populasi, gambaran secara garis besar profil kesehatan di media massa dan budaya.

Permasalahan yang melanda negara berkembang sangat kompleks, khususnya pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat adalah karena adanya ketimpangan antara jumlah pertumbuhan ekonomi, jumlah pertumbuhan penduduk dan kesehatan. Selain banyaknya kemiskinan yang terjadi, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat juga berdampak pada ledakan penduduk. Permasalahan penduduk ini juga menjadi permasalahan yang serius yang melanda Indonesia. Permasalahan penduduk yang begitu rumit sangat berpengaruh terhadap faktor pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi nasional yang dapat dicapai melalui pembenahan taraf hidup masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan serta pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat. Pencapaian tersebut dapat terwujud melalui serangkaian usaha dan kebijakan pemerintah daerah (Arsad,2004).

Bappenas menekankan pentingnya pembangunan berkualitas, yaitu pembangunan yang tidak menciptakan ketimpangan baik antar kelompok masyarakat, antar kelompok wilayah, dan antargenerasi. Oleh karena itu pembangunan yang berhasil tidak meningkatkan kesejahteraan semata, tetapi juga mengikis ketimpangan yang ada. Dalam konteks pemerataan wilayah

pertumbuhan kesejahteraan (pendapatan perkapita) di daerah yang tertinggal harus lebih cepat dibandingkan dengan daerah-daerah yang sudah maju. Dalam konteks pemerataan pendapatan antarpenduduk, keluarga dengan kesejahteraan rendah peningkatan kesejahteraannya harus lebih cepat dibandingkan dengan keluarga yang lebih sejahtera. Namun, perlu disadari bahwa salah satu prasyarat peningkatan kesejahteraan masyarakat ialah pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan menambah peningkatan produksi. Di samping itu, sebagai akibat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan bertambah tinggi. Hal ini akan menyebabkan produktivitas bertambah dan selanjutnya mendorong peningkatan produksi yang lebih cepat dari peningkatan tenaga kerja.

Pertumbuhan penduduk di tentukan oleh tiga faktor yaitu, kelahiran, kematian, dan migrasi. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat disebabkan dua hal, pertama karena tingginya angka migrasi bersih, yang kedua karena angka kelahiran yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat migrasi masuk menjadi sinyal bahwa daerah itu memiliki daya tarik ekonomi yang kuat. Namun, pertumbuhan penduduk akibat angka kelahiran tinggi menciptakan angka ketergantungan yang besar.

Terkait dengan kesejahteraan, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam mengatasi permasalahan-permasalahan khususnya kependudukan dan kesehatan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai institusi pemerintah yang berperan penting dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk harus memberikan prioritas program pada daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah namun pertumbuhan penduduknya tinggi. Program kampung KB yang dicanangkan Presiden Jokowi sejak Januari 2016 lalu sebaiknya diprioritaskan pada daerah-daerah tertinggal dengan tujuan agar daerah tertinggal mampu secara cepat mengejar ketertinggalannya dari daerah maju.

Peran pemerintah sebagai pihak eksternal juga sangat diperlukan untuk membantu pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Program KB terbukti turunkan angka kelahiran di Indonesia. Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) terbaru dari BKKBN menyebutkan tren angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) di Indonesia pada kenyataannya mengalami penurunan sejak tahun 1991. Pada akhir tahun 1991 angka kelahiran total tercatat mencapai 3%. Catatan terbaru melaporkan bahwa angka kelahiran total di Indonesia berhasil diturunkan dari 2,6 anak per wanita pada 2012 menjadi 2,4 anak per wanita pada tahun 2017. Penurunan tren ini sejalan beriringan dengan semakin meningkatnya jumlah pemakaian alat kontrasepsi (alat KB) dari 62% pada tahun 2012 menjadi 66% pada tahun 2017 silam. (Hellosehat.com)

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Setiap tahun jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan. Setiap tahun 4,8 juta anak lahir di Indonesia. Tingginya angka kelahiran menempatkan Indonesia pada urutan keempat dengan populasi mencapai hampir 270 juta jiwa. Akibat dari terganggunya layanan penyediaan kontrasepsi dan konsultasi Keluarga Berencana selama wabah COVID-19, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan akan ada tambahan hingga 500.000 kelahiran baru pada awal 2021. Sedangkan tingkat Jawa Timur angka drop out semakin meningkat dari awal april sebesar 1% dan kini mencapai 7% (18 Juni 2020). (Wiliam,2020)

Melihat angka kelahiran yang cukup tinggi di Indonesia dan Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu kabupaten dengan pertumbuhan laju penduduk yang tergolong tinggi. Hal itu dapat dilihat dari menurunnya partisipasi masyarakat yang mengikuti program KB. Dari data yang dihimpun Lingkarjatim.com, tercatat sejak tahun 2017 jumlah masyarakat yang ikut program KB di Bangkalan sebesar 72,97%, tahun 2018 sebesar 71,99% dan pada tahun 2019 sebesar 67,88%. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti

program KB inilah yang menyebabkan angka kelahiran menjadi tinggi sehingga laju pertumbuhan penduduk meningkat. (Koranmadura)

Dinas Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (KB-P3A) Bangkalan menyebutkan angka ibu hamil kini mencapai 4.821. jumlah tersebut merupakan akumulatif, terhitung dari Maret-Mei 2020. Kepala Dinas KB P3A Bangkalan menyampaikan selama pandemic COVID-19 bulan Maret-April 2020, terjadi kenaikan ibu hamil sebanyak 200. Sementara, Prafalensi program KB 68.61. (Bangkalankab.go.id)

Bila melihat angka populasi seperti diatas, nampaknya penggalakan KB selama ini belum bisa dikatakan berhasil, namun perlu kita ketahui bagaimana sebenarnya program KB ini dapat menyentuh masyarakat hingga yang paling primitif sekalipun. Faktanya, para petugas kesehatan di desa-desa atau disebut bidan desa juga belum bisa menangani seluruh masyarakat. Ini disebabkan karena jumlah tenaga kesehatan berpendidikan yang terbatas. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama masyarakat untuk membangun kesadaran akan kesehatannya sendiri.

Dalam hal pelayanan kesehatan Kabupaten Bangkalan sudah tergolong memadai. Mulai dari tingkat desa sudah tersedia layanan kesehatan Polindes, sedangkan ditingkat kecamatan ada pelayanan Puskesmas, dan ada juga Rumah Sakit Umum yang berada di pusat kota. Dengan tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai tersebut seharusnya masalah-masalah tentang kesehatan bisa teratasi, dan kampanye program KB bisa tersampaikan kepada masyarakat. Pada tahun 2016 pemerintah Indonesia sudah mengkampanyekan pengadaan kampung KB (Keluarga Berencana), yang diharapkan mampu memberi pengetahuan tentang rencana keluarga yang sehat. Dan kemudian pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Bangkalan membentuk kampung KB (Keluarga Berencana) dengan mencanangkan dua desa di setiap kecamatan.

Berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kelahiran. Namun tentunya edukasi tentang kesehatan program KB harus dikampanyekan sejak dini kepada masyarakat, untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat sejak usia remaja.

Di kecamatan Kokop misalnya, Posyandu diadakan sebulan sekali dengan tempat pelaksanaanya bervariasi. Biasanya di tempat yang mudah dijangkau, seperti di ketua RT (Rukun Tetangga) atau RW (Rukun Warga). Kegiatan yang dilakukan saat posyandu misalnya pemberian imunisasi pada bayi, penimbangan berat badan, penyuluhan tentang gizi atau menyangkut kesehatan ibu, termasuk yang hamil, menyusui serta ber-KB.

Lokasi Desa Bandang Laok dipilih sebagai tempat penelitian karena sedikitnya partisipasi masyarakat yang mengikuti program KB serta tingkat kelahiran anak masih terbilang tinggi. Terlebih di era pandemi menyebabkan meningkatnya intensitas hubungan suami istri sehingga menyebabkan meningkatnya angka kelahiran. Dampak pandemi mengakibatkan penurunan aktivitas dalam beberapa kelompok kegiatan program KB serta penurunan mekanisme operasional dilapangan. Banyak para akseptor KB yang merasa takut ketika hendak mengakses pelayanan KB, Selain itu juga kekhawatiran yang akhirnya membuat pasangan mengurungkan diri untuk mendatangi fasilitas kesehatan guna mengikuti program KB. Kemudian juga adanya pembatasan penerimaan pasien dan jam buka di fasilitas kesehatan, klinik, atau bidan terkait aturan physical distancing selama masa pandemi.

Melihat fenomena tersebut, maka peneliti mengambil “Management Komunikasi Kesehatan dalam Pelayanan Program KB di Madura) sebagai judul karena fenomena tersebut sangat menarik untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Management komunikasi kesehatan dalam pelayanan program KB di Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini guna untuk mengetahui bagaimana Management komunikasi kesehatan dalam pelayanan program KB di Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini meliputi beberapa aspek, penelitian yang terfokuskan pada Management komunikasi kesehatan dalam pelayanan program KB di Madura:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan pengetahuan bagi perkembangan ilmu komunikasi, khususnya pada bidang komunikasi kesehatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberi masukan atau referensi bagi kegiatan promosi kesehatan, pelayanan Keluarga Berencana dan program penekanan laju pertumbuhan penduduk.